

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Harmonisasi Sosial

**Fadhilah Aini^{1*}, Karim Suryadi², Kokom Komalasari³
Nurul Husna⁴, Mutia Hidayati⁵**

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³UIN Ar Raniry, Indonesia

Email: fadhilahaini.25@upi.edu

ABSTRAK

Indonesia kaya keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan strategis membentuk harmonisasi sosial melalui penanaman nilai toleransi, solidaritas, dan penghargaan perbedaan pada peserta didik. Penelitian ini menggunakan studi literatur kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran PKn di sekolah. Hasilnya, PKn tidak hanya mentransfer pengetahuan kewarganegaraan, tapi juga membentuk karakter inklusif dan beradab via pembelajaran multikultural serta kearifan lokal. Meski tantangan seperti intoleransi dan diskriminasi masih ada, PKn memperkuat integrasi nasional dan lingkungan belajar damai. Penguatan kurikulum berbasis kebhinekaan, peran guru aktif, serta sinergi sekolah-keluarga-masyarakat esensial untuk generasi harmonis dalam keberagaman Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, Kewarganegaraan, Harmonisasi, Sosial, Sekolah

ABSTRACT

Indonesia is rich in ethnic, religious, racial, and cultural diversity, which has the potential to cause social conflict. Civics Education (PKn) plays a strategic role in fostering social harmony by instilling values of tolerance, solidarity, and respect for differences in students. This research uses descriptive qualitative literature to analyze the role of PKn in schools. The results show that PKn not only transfers civic knowledge but also shapes inclusive and civilized character through multicultural learning and local wisdom. Although challenges such as intolerance and discrimination persist, PKn strengthens national integration and a peaceful learning environment. Strengthening diversity-based curricula, the active role of teachers, and synergy between schools, families, and communities are essential for a harmonious generation amidst Indonesia's diversity.

Keywords: Education, Citizenship, Harmonization, Social, School

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dengan lebih dari 300 suku bangsa, berbagai agama resmi, dan ratusan bahasa daerah. Keragaman ini menjadi modal sosial yang sangat besar, namun juga berisiko menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kenyataannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan harmonisasi sosial yang kokoh **(Kusdiani & Tirtoni, 2025)**. Menurut data terbaru yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2023, terdapat 78 konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun tersebut, dengan latar belakang konflik utama antar kelompok berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) mencapai 65 kasus, serta lainnya seperti konflik vertikal dan penyelesaian lahan. Korban konflik ini termasuk puluhan orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka, menunjukkan dampak nyata dari ketegangan sosial yang masih membayangi Indonesia.

Namun meskipun terdapat potensi dan insiden konflik, Indonesia juga berhasil menjaga kadar toleransi dan kerukunan cukup baik di banyak wilayah. Contoh fenomena sosial positif termasuk praktik gotong royong, toleransi beragama yang diwujudkan melalui saling menghormati ibadah antar umat beragama, dan dialog antar warga yang kerap menjadi alat penyelesaian masalah tanpa kekerasan **(Juliani & Bastian, 2021)**. Inisiatif ini mencerminkan prinsip integrasi dan kohesi sosial yang menjadi dasar harmonisasi masyarakat. Kondisi sosial tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi sosial di Indonesia bukanlah keadaan statis, melainkan proses dinamis yang terus dijaga melalui mekanisme pendidikan, dialog, dan upaya penegakan keadilan sosial. Tingginya angka potensi konflik yang dipetakan Polri juga menegaskan pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan dan program-program multikultural untuk memperkuat nilai toleransi, solidaritas, dan persatuan sebagai benteng utama menjaga keutuhan bangsa.

Pendidikan di lingkungan sekolah di Indonesia diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif dan harmonis tidak hanya sebagai konsep ideal, tetapi juga berdasarkan fakta dan data yang menunjukkan perkembangan dan tantangan nyata **(Kusdiani & Tirtoni, 2025)**. Pendidikan inklusif, misalnya, telah mulai diupayakan dengan menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus per desember 2023, tercatat ada lebih dari 40 ribu sekolah yang memiliki siswa penyandang disabilitas, meskipun penyediaan guru pembimbing khusus masih terbatas (sekitar 14,8% dari sekolah tersebut). Ini menunjukkan langkah nyata menuju terciptanya lingkungan belajar yang inklusif.

Selain itu, penelitian di beberapa sekolah menunjukkan bahwa sikap toleransi antar peserta didik dalam konteks agama dan etnis telah terbentuk melalui interaksi sosial yang sehat **(Juliani & Bastian, 2021)**. Misalnya, studi kasus di sekolah dasar mengungkap bahwa siswa saling menghargai praktik keagamaan dan membangun hubungan sosial yang harmonis meskipun terdapat beberapa tantangan seperti kecanggungan awal dan pengalaman diskriminasi verbal yang masih perlu ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berkontribusi dalam pembentukan sikap toleran yang aktif, bukan sekadar pemahaman pasif.

Lebih lanjut, solidaritas sosial sebagai salah satu bentuk penerapan sikap sosial di sekolah juga mendapat perhatian. Data dari penelitian di SMK di Lampung Tengah menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara interaksi sosial yang positif dan perkembangan sikap solidaritas peserta didik, dengan sebagian besar siswa menunjukkan kesiapan sosial yang baik untuk saling membantu dan berempati **(Kusnoto, 2017)**. Selain itu, berbagai program pembinaan di sekolah yang meliputi kegiatan keagamaan, sosial, serta ekstrakurikuler telah terbukti efektif

dalam menumbuhkan solidaritas melalui keteladanan para pendidik dan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan bersama.

Namun kenyataannya, di beberapa tempat di Indonesia masih ditemukan perilaku intoleransi, diskriminasi, dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang nyata. Data dari berbagai lembaga independen dan media selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kasus intoleransi di ranah publik, termasuk di lingkungan pendidikan. Misalnya, Setara Institute melaporkan peningkatan signifikan siswa yang menunjukkan sikap intoleran aktif, mencapai lebih dari 56% di beberapa kota besar pada tingkat SMA, yang merupakan cerminan kegagalan internalisasi nilai toleransi secara optimal di lingkungan sekolah **(Kusdiani & Tirtoni, 2025)**.

Kasus-kasus intoleransi yang sering dilaporkan meliputi pelarangan pelaksanaan ibadah atau aktivitas keagamaan, diskriminasi verbal dan fisik antar kelompok sosial, serta segregasi sosial berdasarkan latar belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). Sikap ini tidak hanya menimbulkan luka sosial, tetapi juga berpotensi memecah belah kesatuan nasional jika tidak segera mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius.

Ketidakpedulian masyarakat terhadap keberagaman juga menjadi masalah serius yang membuka ruang bagi timbulnya konflik horizontal. Sikap apatis dan acuh tak acuh ini seringkali diperparah oleh minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebhinekaan sebagai modal sosial bangsa **(Kusnoto, 2017)**. Kondisi sosial ini diperparah oleh faktor globalisasi dan perkembangan media sosial yang terkadang menyebarkan narasi-narasi eksklusif dan intoleran.

Di lingkungan sekolah sendiri, berbagai konflik sosial seperti bullying, perpecahan kelompok, dan pertikaian akibat perbedaan latar belakang tetap terjadi dan menjadi tantangan besar bagi upaya harmonisasi sosial. Kasus-kasus tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan dalam proses internalisasi nilai-nilai harmonisasi sosial melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran karakter yang efektif **(Istianah et al., 2023)**. Oleh karena itu, belum optimalnya internalisasi nilai harmonisasi sosial melalui pendidikan kewarganegaraan menimbulkan masalah serius yang jika dibiarkan dapat memicu perpecahan, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta memicu integrasi sosial yang sudah dirintis secara panjang lebar selama ini.

Permasalahan ini berpotensi mengancam integrasi nasional dan menciptakan ketegangan sosial yang dapat menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Kondisi ini juga menampilkan risiko peningkatan konflik horizontal yang merugikan stabilitas sosial. Sehingga, penguatan pendidikan kewarganegaraan sebagai harmonisasi pendidikan sosial menjadi sangat penting untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam membangun persatuan dan kesatuan di tengah dinamika sosial yang kompleks. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta damai **(Istianah et al., 2023)**.

Penelitian terdahulu dan kajian ilmiah menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan efektif dalam menumbuhkan sikap toleransi dan meningkatkan kohesi sosial. Namun demikian, masih diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan inovatif agar nilai-nilai harmonisasi sosial dapat diinternalisasikan secara menyeluruh kepada peserta didik. Penelitian ini menunjukkan pendekatan baru yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan prinsip-prinsip harmonisasi pendidikan sosial secara komprehensif dan aplikatif, fokus pada pembentukan karakter dan moral peserta didik **(Juliani & Bastian, 2021)**. Peneliti

bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan model pembelajaran yang adaptif dan efektif dalam membentuk sikap toleran dan harmonis siswa, sekaligus memberikan strategi konkret bagi pendidik dan pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan sosial yang kompleks.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian untuk mendapatkan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan menguraikan serta memahami konsep-konsep, teori-teori, dan hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis. Pendekatan ini menekankan pada interpretasi isi literatur dan penyajian hasil temuan secara naratif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh literatur ilmiah yang relevan dan kredibel mengenai topik penelitian. Sampel literatur dipilih secara purposive dan sistematis dengan mempertimbangkan relevansi, kualitas, dan keterbaruan sumber agar memberikan informasi yang valid dan representatif untuk mendukung analisis. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa lembar pencatatan atau template ringkasan yang digunakan untuk mendokumentasikan informasi penting dari setiap literatur, yang mencakup teori, hasil penelitian, serta argumentasi utama yang mendukung pemahaman terhadap topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur dengan kata kunci spesifik di berbagai database akademik dan perpustakaan digital. Proses pengumpulan data diikuti dengan seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber yang digunakan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi tema utama, pola, dan hubungan antar konsep penting yang terkandung dalam literatur untuk mengembangkan kerangka pemahaman yang utuh mengenai topik yang diteliti. Tahapan penelitian meliputi penentuan topik dan rumusan masalah, penentuan kriteria literatur yang dijadikan sampel, pengumpulan dan penyaringan literatur berdasarkan relevansi dan kualitas, analisis isi literatur untuk mengidentifikasi tema-tema penting, serta penyusunan laporan hasil studi literatur yang sistematis dan terstruktur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman dalam konteks kehidupan sosial global merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter siswa pada pembelajaran abad ke-21 yang berfokus pada nilai-nilai harmonisasi (**Istianah et al., 2024**). Melalui pengenalan dan penghayatan terhadap keberagaman budaya, agama, bahasa, dan pengalaman hidup, peserta didik diharapkan mampu membangun sikap saling menghargai dan menghargai dalam berbagai situasi sosial (**Dewi & Ulfiah, 2021**). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas kebangsaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan keadilan sosial di tengah dinamika global. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan keterampilan sosial untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, sehingga gangguan dapat diselesaikan dan diselesaikan secara konstruktif.

Pengembangan strategi pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKn menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian dan meningkatkan keharmonisan sosial di lingkungan terkecil, khususnya sekolah dan masyarakat (**Dwi & Muhammad, 2024**). Pembelajaran PKn berperan strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai persahabatan serta semangat kebersamaan dalam keberagaman. Dalam konteks ini, strategi pendidikan multikultural tidak hanya diarahkan pada

pemahaman kognitif terhadap perbedaan budaya, tetapi juga pada pengembangan sikap toleran, empati, dan kemampuan untuk membangun komunikasi lintas budaya yang harmonis. Melalui implementasi pembelajaran yang berorientasi multikultural, peserta didik diharapkan berkembang menjadi warga negara yang terbuka dan berpikir kritis terhadap berbagai isu sosial di sekitarnya (**Agatha, 2019**). Mereka dilatih untuk terampil dalam mengidentifikasi, memahami, dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan seperti kekerasan, diskriminasi, serta tindakan perundungan yang sering terjadi di sekolah. Dengan demikian, pendidikan PKn berfungsi bukan hanya sebagai sarana transfer pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter sosial yang berkeadaban dan berkeadilan.

Selain itu, berbagai penerapan model pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal menjadi strategi efektif dalam mewujudkan pendidikan multikultural yang kontekstual. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diajak mengenal budaya lokal, tetapi juga memahami bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dihormati. Nilai-nilai budaya setempat, seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial, dapat dijadikan contoh nyata dalam mengembangkan sikap saling menghargai dan memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Proses inkulturasi pendidikan multikultural di sekolah seharusnya dimulai dari perencanaan kurikulum yang memuat secara eksplisit nilai-nilai multikultural dalam setiap materi PKn (**Mazid & Suharno, 2019**). Kurikulum perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu menanamkan kesadaran bahwa perbedaan bukan menjadi sumber konflik, melainkan sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang damai. Guru PKn memiliki peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui praktik pembelajaran yang reflektif, dialogis, dan berbasis pengalaman siswa (**Abdul & Saini, 2025**). Dengan demikian, pendidikan PKn yang berbasis multikultural dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun budaya damai, memperkuat kohesi sosial, serta menyiapkan generasi muda yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman dengan rasa saling hormat dan tanggung jawab bersama.

Konstruksi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam memahami esensi warga negara muda yang beradab, beridentitas nasional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks pendidikan abad ke-21 yang mencerminkan dinamika global dan kompleksitas sosial, PKn perlu dikonstruksi sebagai pendidikan yang relevan dengan isu-isu perdamaian, keadilan sosial, serta kebhinekaan. Artinya, PKn bukan sekedar mengajarkan norma dan peraturan kewarganegaraan, tetapi harus membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menghargai perbedaan (**Darmawan et al., 2025**). Untuk mewujudkan hal tersebut, materi pembelajaran PKn perlu diarahkan agar mampu merangsang perubahan karakter peserta didik menuju pribadi yang berwatak baik dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan tidak cukup hanya menekankan aspek pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga harus menumbuhkan kepekaan moral dan sosial yang menjadi landasan utama kehidupan beradab (**Iswanda & Dewi, 2021**). Proses ini melibatkan pembelajaran yang reflektif, dialogis, dan partisipatif sehingga siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan secara mendalam dan kontekstual.

Elemen pokok dalam pengajaran PKn mencakup tiga domain utama, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap atau watak kewarganegaraan (**Anggriana & Apiek, 2023**). Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap prinsip, sistem, serta nilai-nilai dasar kehidupan bernegara yang menempati ranah kognitif. Keterampilan kewarganegaraan meliputi kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, berpikir kritis terhadap kebijakan publik, serta berkomunikasi dan

berkolaborasi secara konstruktif, elemen ini termasuk dalam ranah psikomotorik (**Ismail et al., 2024**). Sementara itu, sikap atau watak bawah sadar menguasai ranah afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi serta perdamaian. Keterpaduan antara ranah ketiga tersebut menjadi inti dari konstruksi pendidikan PKn yang bermakna. Melalui integrasi kognitif, psikomotorik, dan afektif secara seimbang, PKn dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi. Dengan demikian, konstruksi PKn yang berbasis pada nilai-nilai perdamaian dan kebhinekaan diharapkan mampu melahirkan warga negara muda yang berkarakter, kritis, serta mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang multikultural.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, keberagaman praktik bahasa, agama, dan budaya menjadi tantangan sekaligus peluang dalam dunia pendidikan. Kondisi ini menuntut para pendidik untuk memiliki pemahaman komprehensif mengenai kebijakan pendidikan yang terkait dengan nilai-nilai multikultural, serta kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Keterlibatan aktif pendidik dalam memahami dan mengadaptasi dokumen kebijakan pendidikan menunjukkan adanya mandat normatif yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan multikultural ke dalam setiap aspek pengajaran (**Widya et al., 2003**). Mandat tersebut mengandung makna bahwa pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus dilandasi oleh upaya sadar untuk menanamkan nilai-nilai yang diberikan terhadap keberagaman, toleransi, serta kemampuan berinteraksi positif antarbudaya. Integrasi pendidikan multikultural ke dalam PKn tidak sekedar menjadi respon terhadap tantangan pluralitas masyarakat, melainkan juga sebagai strategi proaktif dalam membangun identitas nasional yang inklusif dan berkeadaban (**Nasution et al., 2025**). Guru sebagai fasilitator memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa materi pembelajaran PKn mewujudkan nilai-nilai multikultural secara nyata melalui pendekatan pedagogik yang demokratis dan dialogis.

Secara keseluruhan, konstruksi PKn yang berlandaskan nilai-nilai multikultural diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang damai dan harmonis. Hal ini diwujudkan melalui pembelajaran yang mempromosikan pemahaman lintas budaya, mengajarkan resolusi secara konflik damai, serta menanamkan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan sosial masyarakat majemuk. Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal tidak hanya memberikan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan terbentuknya kohesi sosial dalam keberagaman.

Upaya menciptakan sekolah yang berlandaskan pendidikan yang tentram perlu segera diwujudkan melalui langkah-langkah strategi yang fokus pada penguatan nilai dan budaya damai. Kesadaran global tentang pentingnya pendidikan yang berorientasi pada perdamaian semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai konflik sosial, politik, dan budaya di berbagai belahan dunia. Pendidikan ketenangan menjadi salah satu respon paling humanis terhadap kondisi pasca-konflik, karena berfungsi tidak hanya untuk memulihkan keadaan masyarakat yang trauma, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan keadilan sejak dini. Dalam konteks ini, PBB melalui lembaga-lembaga seperti UNICEF dan UNESCO telah mengembangkan paradigma pendidikan perdamaian sebagai sarana membantu masyarakat mencapai stabilitas sosial dan emosional. (**Istianah et al., 2023**) menegaskan bahwa pendidikan perdamaian berperan penting dalam mengembalikan komunitas sekolah menuju suasana yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan, sehingga sekolah dapat menjadi ruang yang kondusif untuk pertumbuhan karakter dan moral peserta didik.

Analisis terhadap dinamika konflik dan upaya mewujudkan perdamaian dapat ditinjau dari berbagai perspektif keilmuan, politik, ekonomi, budaya, dan sosial, yang semuanya saling melengkapi dalam memahami akar permasalahan. Perspektif multidisipliner ini memperkaya pendekatan pendidikan kedamaian agar tidak hanya fokus pada penanganan gejala konflik, tetapi juga penyelesaian akar penyebabnya secara berkelanjutan. Menurut Susetyo dan rekan (2022), keberhasilan terlaksananya pendidikan kedamaian di sekolah tidak terlepas dari keseimbangan antara dua aspek utama: pembangunan lingkungan yang aman dan pelatihan kompetensi sosial peserta didik (**Abidin & Ismail, 2014**). Mewujudkan sekolah yang bebas dari tindakan kekerasan merupakan langkah awal yang penting, namun lebih jauh dari itu, kedamaian pendidikan juga harus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis terhadap konflik, keterampilan resolusi damai, serta komitmen terhadap nilai keadilan sosial.

Iklim sekolah yang positif merupakan faktor kunci dalam mendorong seluruh peserta didik dan tenaga pendidik merasa menjadi bagian integral dari komunitas sekolah serta termotivasi untuk secara aktif berkontribusi menjaga kondisi sekolah tetap kondusif dan harmonis (**Deya & Novianty, 2025**). Penelitian terkini menunjukkan bahwa pendidik dapat menciptakan ruang kelas yang ramah dan inklusif melalui berbagai langkah preventif dan korektif untuk menjamin kesejahteraan emosional dan sosial peserta didik. Dalam upaya mewujudkan sekolah ramah anak, penerapan langkah-langkah pencegahan sangat penting dan harus diarahkan pada dua hal utama, yaitu (a) pemberian arahan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, serta (b) penetapan prosedur dan aturan yang efektif guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tenang, dan bebas dari kekerasan. Sebagai bagian dari perbaikan strategi, siswa yang terdampak oleh kejadian yang terjadi atau konflik di sekolah dapat memperoleh dukungan layanan konseling yang komprehensif. Dalam peranannya, konselor bertindak multifungsi, tidak hanya sekedar memberikan dukungan psikologis, tetapi juga sebagai mediator yang membantu konflik menengahi, mengamati dinamika sosial di sekolah, mengkomunikasikan kebutuhan peserta didik kepada pihak terkait, serta bernegosiasi untuk menemukan solusi damai yang berkelanjutan. Peran ini sangat krusial dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan di lingkungan sekolah (**Abidin & Ismail, 2014**). Lebih jauh lagi, penting untuk mengintegrasikan strategi pendidikan keberagaman khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagai upaya strategi untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan rasa kebersamaan di antara peserta didik. Pendekatan ini menjadi langkah krusial dalam mewujudkan perdamaian serta memperkuat keharmonisan sosial, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas.

Pendidikan kebhinekaan dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu strategi utama untuk mewujudkan sekolah yang damai dan inklusif. Dalam konteks pembelajaran PKn, penanaman nilai-nilai kebhinekaan bukan hanya sekedar pengenalan keberagaman, tetapi juga pengembangan sikap saling menghormati, toleransi, dan pengakuan terhadap perbedaan budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia (**Kusdiani & Tirtoni, 2025**). Pengembangan model pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual sangat diperlukan agar nilai-nilai kebhinekaan dapat diterima dan dipraktikkan oleh siswa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini harus mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis, sehingga setiap peserta didik merasa dihargai dan mampu berkontribusi secara positif dalam dinamika sosial di sekolah maupun masyarakat luas.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan kebhinekaan di Indonesia diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi para pendidik dan pembuat kebijakan dalam merancang program serta

kebijakan pendidikan yang mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis dalam keberagaman **(Abidin & Ismail, 2014)**. Pendidikan kebhinekaan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter siswa yang toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan, sehingga mereka mampu hidup berdampingan secara damai serta berinteraksi secara konstruktif dengan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan kepada peserta didik. Melalui pembelajaran PKn, siswa tidak hanya diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, tetapi juga dibekali dengan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk. PKn menjadi sarana penting untuk membentuk karakter bangsa yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan, sehingga siswa mampu menghargai keragaman budaya, suku, agama, dan pandangan yang ada di lingkungan sosialnya **(Ni et al., 2024)**. Selain itu, melalui mata pelajaran tersebut, siswa diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial seperti saling menghormati, empati, dan kerja sama, yang merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan sosial dalam konteks kebhinekaan. Dengan demikian, PKn berperan sebagai landasan pendidikan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang harmonis dan damai, serta mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi positif dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, karakter bangsa merupakan kualitas perilaku kolektif yang keunikan menampilkan dan identitas kebangsaan Indonesia **(Juliani & Bastian, 2021)**. Hal ini tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, serta perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang muncul sebagai hasil dari proses pengolahan potensi pikir, hati, rasa, karsa, dan raga individu atau kelompok. Dengan demikian, pembangunan karakter bangsa bukan sekedar upaya membentuk perilaku moral, tetapi juga proses menyeluruh yang mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan jasmani yang saling berkaitan untuk menghasilkan manusia Indonesia berjiwa Pancasila.

Individu yang memiliki jiwa Pancasila adalah mereka yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai tersebut bersumber dari empat dimensi pembentuk karakter, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa, yang saling melengkapi satu sama lain **(Juliani & Bastian, 2021)**. Olah hati mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, amanah, keadilan, kedisiplinan, tanggung jawab, empati, keberanian mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, serta semangat patriotik. Olah pikir menandai kecerdasan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, rasa ingin tahu, produktivitas, orientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan reflektif dalam melihat pengalaman hidup.

Sementara itu, olahraga menggambarkan pembentukan karakter melalui kebugaran fisik dan kedisiplinan diri sehingga terwujud pribadi yang sehat, bersih, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Adapun olah rasa dan karsa menjadi landasan penting bagi terciptanya nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, gotong royong, saling menghormati, toleransi, sikap nasionalis, kepedulian sosial, keterbukaan terhadap dunia (kosmopolit), pengutamaan kepentingan umum, cinta tanah air, kebanggaan terhadap bahasa dan produk Indonesia, dinamisitas, kerja keras, dan etos kerja yang tinggi.

Dasim Budimansyah (dalam Sulistyarini, 2015) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai kontribusi pendidikan terhadap perkembangan karakteristik yang menandai sebagai kontribusi pendidikan terhadap perkembangan karakteristik yang menandai sebagai warga negara. Ada tiga peran PKn menurut Dasim

Budimansyah, pertama, berdasarkan pendekatan psycho pedagogical development yakni PKn sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi), maupun non formal (luar sekolah), yang berperan sebagai instrument pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai potensinya agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas (smart and good citizen). Kedua, berdasarkan pendekatan socio-cultural development yakni PKn sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai aktualisasi diri warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab. Ketiga, berdasarkan pendekatan socio political intervention yakni PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara Negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan kebajikan kewarganegaraan (civic disposition).

Pendidikan moral merupakan landasan fundamental dalam pembentukan karakter dan menginternalisasi nilai-nilai yang esensial bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Dalam ranah sosial, harmonisasi tidak sekedar dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai suatu kondisi dinamis yang mencerminkan persatuan, dihargai terhadap keberagaman, serta terwujudnya kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Oleh karena itu, moral pendidikan memiliki peran strategis dalam membimbing individu untuk mencapai kesadaran sosial yang lebih tinggi, di mana nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam setiap tindakan dan interaksi. Pendidikan moral tidak hanya terfokus pada sinkronisasi norma dan aturan perilaku, tetapi juga mencakup proses pelatihan kepribadian yang utuh melalui pengembangan dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Melalui proses pendidikan yang menyentuh akal budi dan hati nurani, individu diarahkan untuk berpikir etis, berempati terhadap sesama, serta berperilaku berdasarkan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai universal **(Juliani & Bastian, 2021)**. Dengan demikian, moral pendidikan berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah berbagai perbedaan. Selain itu, moral pendidikan berperan dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, disiplin, solidaritas, dan kepedulian sosial yang menjadi landasan bagi terbentuknya warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Melalui pengajaran yang menekankan aspek empati dan etika, peserta didik dibimbing untuk memahami makna sejati dari kehidupan bermasyarakat yang berkeadaban. Pada akhirnya, pendidikan moral tidak hanya melahirkan individu yang bermoral tinggi, tetapi juga menciptakan tatanan masyarakat yang berkarakter, adil, dan harmonis, sejalan dengan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama **(Kusnoto, 2017)**.

Pendidikan moral memberikan kontribusi yang sangat penting dalam membangun kesadaran multikultural di tengah masyarakat yang semakin beragam. Dengan menanamkan nilai-nilai universal seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan, pendidikan moral membuka kapasitas pemahaman individu terhadap keberagaman yang ada di sekitarnya. Proses pembelajaran moral tidak hanya mengajarkan norma-norma perilaku, tetapi juga mengembangkan sikap inklusif yang memperkuat penerimaan dan perayaan atas keanekaragaman budaya dan sosial. Melalui pendidikan moral, individu diperlengkapi dengan keterampilan komunikasi yang efektif serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dan tanpa kekerasan. Kemampuan ini sangat penting dalam menciptakan dialog yang terbuka dan jujur, sehingga memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih mendalam antar kelompok yang berbeda latar belakang. Dengan demikian, moral pendidikan tidak hanya berperan dalam membentuk karakter individu, tetapi juga menjadi mediator dalam

pengelolaan konflik sosial yang sehat dan harmonis. Lebih jauh lagi, pendidikan moral tidak terbatas pada ruang kelas semata, melainkan berkolaborasi melalui keterlibatan masyarakat secara luas. Melalui berbagai kegiatan sosial, proyek kemanusiaan, dan sinergi antara sekolah, keluarga, dan komunitas, pendidikan moral menciptakan jaringan kolaboratif yang menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menjadikan pendidikan moral sebagai instrumen strategi untuk mengembangkan kesadaran multikultural sekaligus memperkokoh harmonisasi sosial di lingkungan masyarakat yang pluralistik **(Kusnoto, 2017)**.

Jurnal ini juga membahas berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan moral sebagai upaya mewujudkan harmonisasi sosial di tengah kompleksitas masyarakat modern. Salah satu tantangan utama adalah batasan kurikulum yang masih belum sepenuhnya mengakomodasi adaptasi nilai-nilai moral secara menyeluruh dan kontekstual sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Kurikulum yang lebih berorientasi pada aspek kognitif tanpa dukungan penguatan nilai afektif dan sosial berpotensi menghambat pembentukan karakter yang integratif dan bertanggung jawab. Selain itu, peran media sosial juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pendidikan moral. Media sosial sering kali menyajikan informasi yang beragam dan tidak selalu mendukung nilai-nilai luhur, sehingga membutuhkan kemampuan literasi digital dan etika bermedia yang kuat untuk menyaring dampak negatifnya. Di pihak lain, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana efektif untuk menyebarkan nilai moral dan edukasi yang inklusif serta mendorong dialog antarwarga yang beragam.

Lebih jauh lagi, peran keluarga tetap menjadi pondasi utama dalam terbentuknya nilai-nilai moral sejak dini. Namun tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsi ini secara optimal akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung proses pendidikan moral yang komprehensif **(Abidin & Ismail, 2014)**. Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, solusi yang dapat ditempuh antara lain adalah pengembangan kurikulum yang holistik dengan integrasi karakter pendidikan yang menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Peningkatan literasi digital dan edukasi etika bermedia bagi seluruh lapisan masyarakat juga menjadi langkah strategis dalam menghadapi dampak media sosial. Selain itu, penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, dan komunitas melalui program kolaboratif serta kegiatan sosial yang mendukung keterlibatan aktif warga menjadi kunci keberhasilan pendidikan moral. Dengan menggabungkan nilai-nilai moral, kemampuan komunikasi yang efektif, dan keterlibatan komunitas secara luas, moral pendidikan memiliki potensi besar untuk memainkan peran sentral dalam menciptakan masyarakat yang harmonis **(Iswanda & Dewi, 2021)**. Kesadaran sosial yang tinggi dan dianugerahi nilai-nilai kemanusiaan pada akhirnya akan memperkokoh fondasi harmonisasi sosial di seluruh lapisan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai harmonisasi pendidikan sosial yang bertujuan membentuk karakter warga negara yang toleran, inklusif, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman Indonesia yang kaya akan suku, agama, ras, dan golongan. Melalui pendekatan multikultural, PKn tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, solidaritas, rasa hormat, dan penghargaan terhadap perbedaan yang menjadi modal utama membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam membangun harmonisasi sosial memerlukan integrasi tiga ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi. Kurikulum yang berorientasi pada nilai-nilai kebhinekaan dan perdamaian, serta penerapan model pembelajaran yang kontekstual berbasis

kearifan lokal, dapat mendorong siswa memahami keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga. Meski terdapat tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, dan pengaruh negatif media sosial, penguatan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana internalisasi nilai harmonisasi sosial tetap menjadi kunci utama dalam mencegah konflik sosial dan memperkuat integrasi nasional. Peran aktif guru, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan damai, sehingga sekolah menjadi ruang yang kondusif untuk membentuk generasi muda yang berakarakter dan mampu menjadi agen perubahan sosial. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan harmonisasi sosial tidak hanya berkontribusi pada pembelajaran akademik, tetapi juga pada pembangunan karakter bangsa yang beradab, berkeadilan, dan berorientasi pada perdamaian sosial demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis dan damai.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, M., & Saini. (2025). *Transformasi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Nilai Sosial Di Era Global*. 7(1), 252–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i1.4119>
- Abidin, Z., & Ismail, T. (2014). Pembangunan pendidikan perdamaian dari sekolah: Pendekatan gerakan sosial. *Suhuf*, 187–206.
- Agatha, K. (2019). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan*, 36.
- Anggriana, M., & Apiek, G. (2023). *Analisis kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat sekolah dasar*. 2(3), 10267–10285.
- Darmawan, C., Moh, W. K., Sapriya, S., & Syaifullah, S. (2025). *Analisis Model Literasi Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Bangsa Peserta Didik*. 10, 120–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.40984>
- Dewi, D. A., & Ulfiah, Z. (2021). *Peranan pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan karakter bangsa*. 9(2), 499–506.
- Deya, R. H. A., & Novianty, D. (2025). Peran Budaya Sekolah dan Iklim Belajar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi Kualitatif di SDN 10 Bongomeme. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2, 36–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/hdcffv58>
- Dwi, N., & Muhammad, F. M. (2024). *Implementasi pendidikan multikultural dalam pkn untuk menumbuhkan toleransi dan nasionalisme siswa sekolah dasar*. 5(2), 92–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.51875/jispe.v5i02.536>
- Ismail, M., Basariah, B., & Dahlan, D. (2024). *Implementasi Citizenship Education di Perguruan Tinggi*. 9, 741–748. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.3098>
- Istianah, A., Darmawan, C., Sundawa, D., & Fitriarsi, S. (2024). *Peran Pendidikan Kebhinekaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Damai*. 9(1), 15–29.
- Istianah, A., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Konsep sekolah damai: Harmonisasi profil pelajar Pancasila dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. *Journal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 11(3), 333–342. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5048>
- Iswanda, M. L., & Dewi, D. A. (2021). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi*. 5, 1494–1500.
- Juliani, A. J., & Bastian, A. (2021). Pendidikan karakter sebagai upaya mewujudkan Pelajar Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila*, 257–265.
- Kusdiani, S. D., & Tirtoni, F. (2025). Implementasi Pendidikan Pancasila Berkebhinekaan Global Sebagai Upaya Menumbuhkan Karakter Literasi Multikultural Budaya Nusantara Siswa SD.

- Educatio: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 20(1), 86–98.
<https://doi.org/10.29408/edc.v20i1.29868>
- Mazid, S., & Suharno, S. (2019). *Implementasi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan*. 6(1), 72–85.
- Nasution, I. R., Siregar, A. S., Leonita, T. A., & Lubis, H. T. (2025). Strategi Guru dalam Mengatasi Tantangan Pembelajaran PPKn di Era Digital MAN 1 Medan. *Toga Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 1(3), 108–115. <https://doi.org/10.56211/toga.v1i3.972>
- Ni, L. I. W., Ni, W. R. D., Bestari, L., Putu, S., & Wayan, M. (2024). Membangun kesadaran multikultural melalui implementasi model pendidikan inklusif di sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11, 383–396.
- Widya, F., Wilda, A. B., & Anwar, S. S. (2003). *Integrasi Pendidikan Multikultural Dalam Sistem Pendidikan Nasional: Strategi Membangun Masyarakat Inklusif Dan Toleran*. 186–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.47006/pendalas.v4i3.509>